

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ali, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2017, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, “*Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, “*Mengenal Peradilan di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2019, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1986, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tana*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, Jakarta.
- Marbun, S.F, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*”, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- NG, Marshaal , Sri Suatmiati, dan Angga Saputra, 2018, “*Hukum Acara Tata Negara Indonesia*”, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Panjaitan, Budi Sastra, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. Manhaji, Medan.
- Perangin, Effendi, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Tutik, Triwulan T, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Putakaraya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia indonesia, Semarang.
- Wantu, Fence M. , 2014, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Reviva Cendikia, Gorontalo.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

JURNAL

- Abdullah, Ujang, 2010, *Kompetensi Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia*” (kertas kerja/makalah) , 10th congress of the IASA, Sidney
- Bunga, M, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Gorontalo Law Review, hlm. 39-40. Diunggah dari <http://dx.doi.org/10.32662/golrev.v1i1.155>.
- Hamidah, Upik, 2012, *Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia.
- Lathif, Nazaruddin , 2017, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review.

- Muderana, Ngakan Putu, 1997, *Landreform Dan Revolusi Nasional Indonesia*,
Jurnal Perspektif.
- Nadzir, Muhammad, Suwandi, 2017, *Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah*, Jurnal De Facto.
Diunggah dari <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/43/30>
- Panjaitan, Bernat, 2015, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana , 2018, *Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jakarta.
- Pramana, I.G.A.E, I.M.Arjaya, dan I.A.P.Widiati, 2019, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps)*. Jurnal Analogi Hukum.
- Santoso, Urip, 2011, *Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perpanjangan Jangka Waktu)*, Jurnal Hukum,
- Sapriadi, 2015, *Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbaw*, Jurnal IUS.
- Sucianti, Nadya, 2004, *Land Reform Indonesia*, Lex Jurnalica.
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas

Parahyangan, Bandung,

Thalib, Muh. Zein, 2019, *Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*, Jurnal Yustisiabel.

Wahyunadi, Y. M, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan.

Wangge, Mario Viano Rasi, dkk, 2020, *Intervensi Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.

UNDANG-UNDANG DAN SUMBER HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 16/G/2021/PTUN.PTK.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 17/G/2021/PTUN.PTK.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 18/G/2021/PTUN.PTK.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

INTERNET

Tim Yuridis. “*Amar Putusan PTUN*”, Yuridis.id, 2018, available from
<https://yuridis.id/amar-putusan-ptun/>